

	News Title : Bappebti Resmi Meluncurkan Bursa Kripto	
	Media Name : Theiconomics.com	Journalist : Rommy Yudhistira
	Publish Date : 21 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Event	Topic : Bursa Kripto

Bappebti Resmi Meluncurkan Bursa Kripto

Reporter: **Rommy Yudhistira**
Editor: **Redaksi** July 21, 2023



Ilustrasi aset kripto

Iconomics - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan telah menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

- [Kemendag Terbitkan 2 Permendag Baru yang Berlaku Sejak 19 Juli 2023](#)
- [Efisienkan Sistem Logistik, Inilah Langkah-langkah Pelindo](#)
- [Sri Mulyani Usulkan Adanya 'Standar Kebijakan Global' untuk Aset Kripto](#)

Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko menjelaskan pihaknya juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI SP-LKBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.

Didid mengatakan hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennen Depository Indonesia.

"Pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat pelangan," kata Didid dalam keterangan resminya yang dikutip pada Jumat (21/07/2023).

Baca Juga : [Komisi VI dan Pemerintah Sepakat Bawa 2 RUU Kerja Sama Dagang ke Paripurna](#)

Didid mengatakan pembentukan kebijakan tersebut difokuskan agar industri kripto di Indonesia tetap berjalan dengan baik, serta mampu berkontribusi bagi perekonomian negara.

Di samping itu, Didid mengatakan persetujuan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan bursa itu mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam prosesnya, Didid menuturkan pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas, agar industri kripto dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

"Perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu cepat," tuturnya.